

LAPORAN EKSEKUTIF

**PERKEMBANGAN
TINGKAT KEMISKINAN
PROVINSI BANTEN**

MARET 2017



LAPORAN EKSEKUTIF

**PERKEMBANGAN
TINGKAT KEMISKINAN
PROVINSI BANTEN**

MARET 2017



Laporan Eksekutif Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten Maret 2017

ISSN : 2443-3411
No. Publikasi : 36520.1707
Katalog : 3205011.36

Ukuran Buku : 17.6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : iv + 17 Halaman

Naskah :
Bidang Statistik Sosial

Penyunting :
Bidang Statistik Sosial

Desain Kover :
Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh :
© Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Dicetak oleh :
CV. Dharmaputra

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

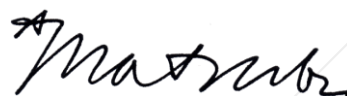
KATA PENGANTAR

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan pokok yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Banten pada khususnya. Untuk membuat suatu kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan diperlukan data kemiskinan yang menyeluruh.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten sejak tahun 2007 telah merilis tingkat kemiskinan makro provinsi keadaan bulan Maret tahun yang bersangkutan. Mulai tahun 2011, BPS Provinsi Banten merilis tingkat kemiskinan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu keadaan bulan Maret dan bulan September. BPS Provinsi Banten mulai menyusun laporan eksekutif tentang kemiskinan pada tahun 2014, yang bertujuan untuk mengulas secepat gambar data kemiskinan. Laporan eksekutif hasil rilis kemiskinan keadaan Maret 2017 disajikan dalam bentuk publikasi "Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten Maret 2017".

Diharapkan laporan ini dapat memberikan pemahaman tentang tingkat kemiskinan di Provinsi Banten. Semoga bermanfaat.

Serang, Agustus 2017
**Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Banten**



Agoes Soebeno

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
I. Pendahuluan	1
II. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Maret 2017 per Provinsi	3
III. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten, Maret 2011-Maret 2017.....	5
IV. Garis Kemiskinan	8
V. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	12
VI. Ketimpangan Pendapatan	14

BAB I PENDAHULUAN

Menurut *World Bank*, kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain (BPS, 2015). Sedangkan konsep yang dipakai BPS, kemiskinan merupakan ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (*basic needs approach*) yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan dihitung dengan menggunakan metode Garis Kemiskinan (GK). Komponen dari GK adalah Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

GKM setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita per hari. Pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita per hari dihitung berdasarkan 1 basket komoditi yang terdiri dari 52 jenis komoditi. GKNM setara dengan kebutuhan minimum bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Untuk mengukur kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

GK adalah sejumlah uang untuk membeli makanan yang mengandung 2.100 kkal per hari dan keperluan mendasar bukan makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK.

Sumber data yang digunakan dalam menghitung GK adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) ditambah dengan Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD). Penghitungan yang didasarkan pada hasil survei menyebabkan angka kemiskinan yang dihitung dengan GK hanya bersifat estimasi atau disebut sebagai data makro. Data kemiskinan makro tidak dapat memberikan informasi siapa dan dimana penduduk miskin itu berada. Data

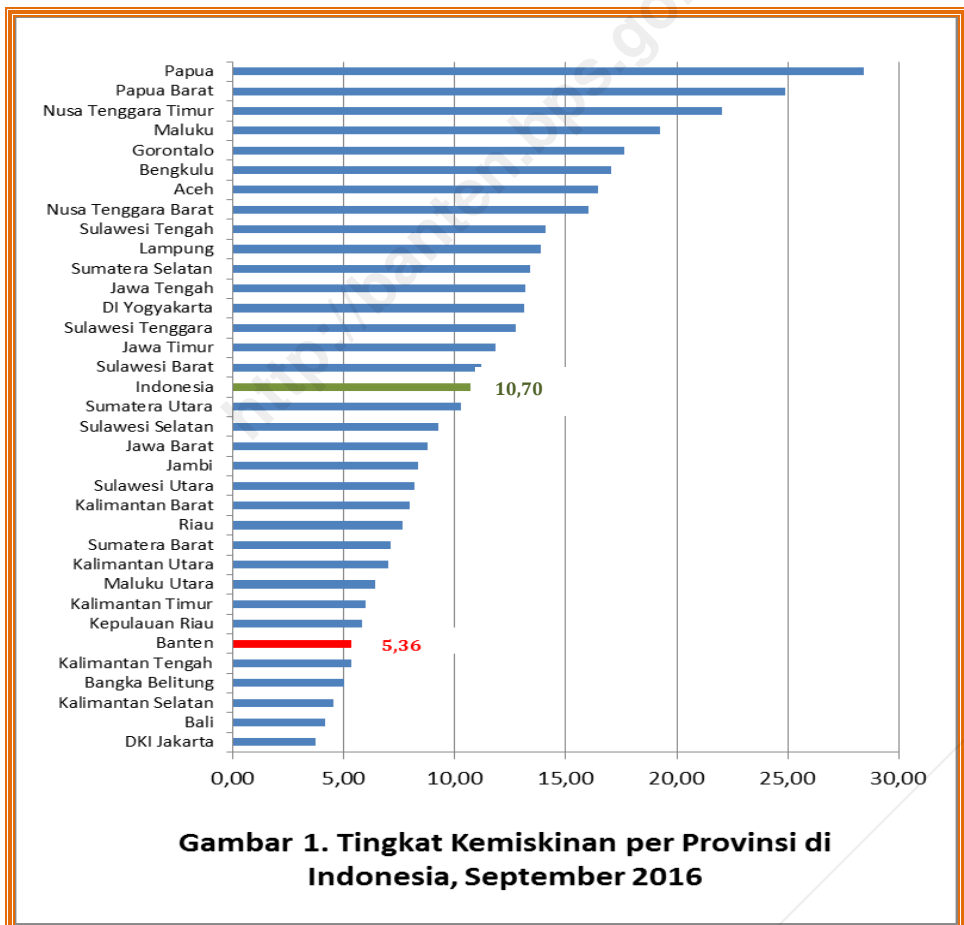
kemiskinan makro digunakan untuk : (1) mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, (2) membandingkan kemiskinan antar waktu antar daerah, dan (3) menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

<http://banten.bps.go.id>

BAB II

PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN MARET 2017 PER PROVINSI

Tingkat kemiskinan Banten cukup rendah apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pada Maret 2017, tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tercatat sebesar 5,36 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 657,74 ribu orang. Secara nasional, tingkat kemiskinan Banten berada pada posisi terendah keenam setelah DKI Jakarta (3,75%), Bali (4,15%), Kalimantan Selatan (4,52%), Bangka Belitung (5,04%) dan Kalimantan Tengah (5,36%) seperti terlihat pada Gambar 1.



Tabel 1. Indikator Kemiskinan per Provinsi, Maret 2017

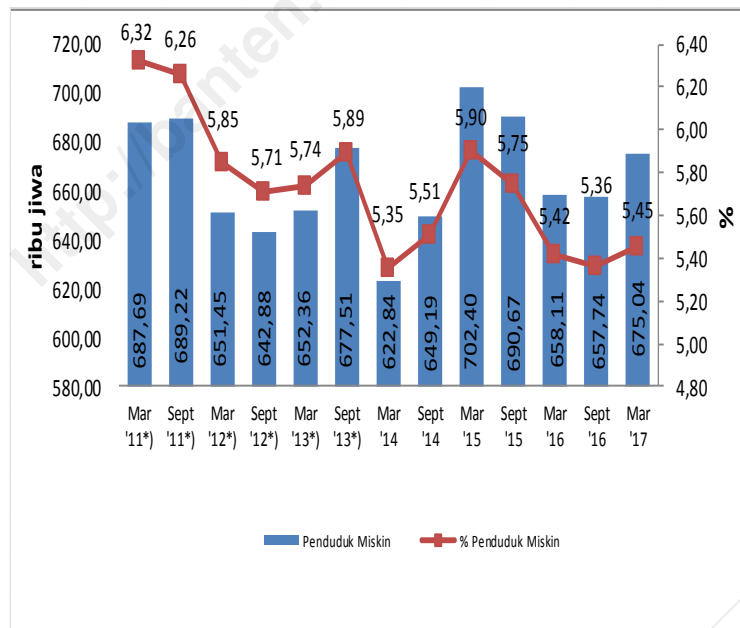
Provinsi	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	16,89	872,61	435.454
Sumatera Utara	10,22	1.453,87	411.345
Sumatera Barat	6,87	364,51	453.612
Riau	7,78	514,62	456.493
Jambi	8,19	286,55	389.596
Sumatera Selatan	13,19	1.086,92	370.060
Bengkulu	16,45	316,98	450.648
Lampung	13,69	1.131,73	384.882
Bangka Belitung	5,20	74,09	587.530
Kepulauan Riau	6,06	125,37	513.237
DKI Jakarta	3,77	389,69	536.546
Jawa Barat	8,71	4.168,44	344.427
Jawa Tengah	13,01	4.450,72	333.224
DI Yogyakarta	13,02	488,53	374.009
Jawa Timur	11,77	4.617,01	342.092
Banten	5,45	675,04	386.753
Bali	4,25	180,13	361.387
Nusa Tenggara Barat	16,07	793,78	345.341
Nusa Tenggara Timur	21,85	1.150,79	343.396
Kalimantan Barat	7,88	387,43	377.219
Kalimantan Tengah	5,37	139,16	401.537
Kalimantan Selatan	4,73	193,92	402.424
Kalimantan Timur	6,19	220,17	548.094
Kalimantan Utara	7,22	49,47	552.040
Sulawesi Utara	8,10	198,88	333.510
Sulawesi Tengah	14,14	417,87	391.763
Sulawesi Selatan	9,38	813,07	283.461
Sulawesi Tenggara	12,81	331,71	285.609
Gorontalo	17,65	205,37	296.730
Sulawesi Barat	11,30	149,76	302.852
Maluku	18,45	320,51	436.865
Maluku Utara	6,35	76,47	390.998
Papua Barat	25,10	228,38	499.778
Papua	27,62	897,69	457.541
Indonesia	10,64	27.771,22	374.478

BAB III

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI BANTEN MARET 2011-MARET 2017

Trend jangka panjang menunjukkan tingkat kemiskinan Banten mengalami penurunan walaupun terjadi fluktuasi pada periode-periode tertentu. Pada Maret 2011 angka kemiskinan berada pada kisaran 6 poin sedangkan pada Maret 2017 angka kemiskinan berada pada satu poin lebih rendah. Fluktuasi terjadi pada September 2013 (5,89 persen), mengalami penurunan sampai titik terendah pada Maret 2014 (5,35 persen) dan mencapai puncaknya pada Maret 2015 (5,90 persen). Hal utama pemicu naik turunnya tingkat kemiskinan di Banten adalah terjadinya peningkatan harga (inflasi) yang tidak didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat.

Pada Maret 2017, tingkat kemiskinan Banten 5,45 persen atau turun 0,09 persen dari September 2016



Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Catatan : * Hasil backasting dengan menggunakan penimbang Proyeksi Penduduk 2010-2035

Gambar 2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten, Maret 2011-Maret 2017

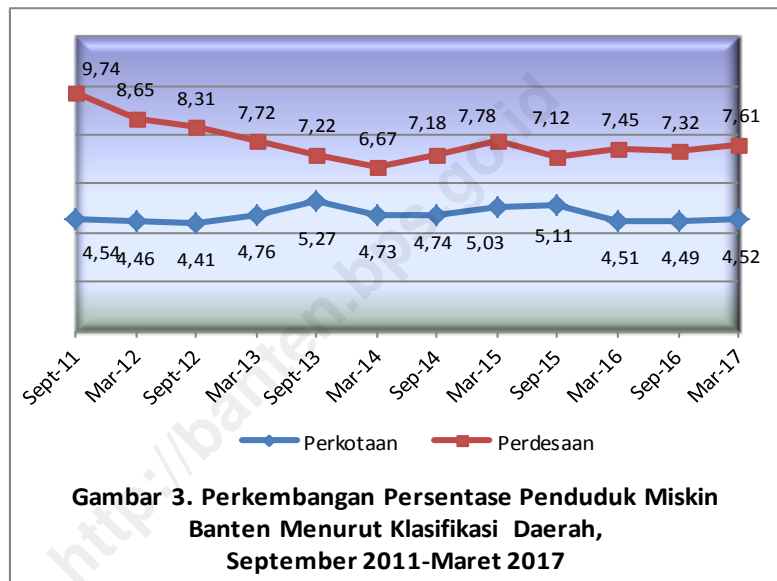
Tabel 2. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Banten, Maret 2011-Maret 2017

Bulan/ Tahun	Kota		Desa		Total	
	Persentase	Jumlah (000 jiwa)	Persentase	Jumlah (000 jiwa)	Persentase	Jumlah (000 jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mar-11	4,61	334,16	9,75	353,53	6,32	687,69
Sep-11	4,54	334,32	9,74	354,91	6,26	689,22
Mar-12	4,46	332,31	8,65	319,14	5,85	651,45
Sep-12	4,41	330,68	8,31	312,19	5,71	642,88
Mar-13	4,76	361,64	7,72	290,72	5,74	652,36
Sep-13	5,27	411,31	7,22	266,20	5,89	677,51
Mar-14	4,73	375,69	6,67	247,14	5,35	622,84
Sep-14	4,74	381,18	7,18	268,01	5,51	649,19
Mar-15	5,03	408,53	7,78	293,87	5,90	702,40
Sep-15	5,11	418,95	7,12	271,71	5,75	690,67
Mar-16	4,51	377,10	7,45	281,01	5,42	658,11
Sep-16	4,41	380,16	7,32	277,58	5,36	657,74
Mar-17	4,52	391,03	7,61	284,00	5,45	675,04

Berbeda arah dengan kondisi nasional, pada Maret 2017 tingkat kemiskinan di Banten justru meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada September 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 657,74 ribu jiwa (5,36 persen) bertambah 17,3 ribu jiwa pada Maret 2017 menjadi 675,04 ribu jiwa (5,45persen). Beberapa faktor terkait peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode ini adalah :

1. Inflasi umum September 2016-Maret 2017 sebesar 2,52 persen lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi umum Maret-September 2016 sebesar 0,92.
2. Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan indikator *proxy* kesejahteraan petani, pada periode Maret 2017 hanya sebesar 98,19. NTP dibawah 100 berarti petani mengalami defisit, pendapatan yang diterima lebih rendah daripada pengeluarannya. Sedangkan NTP periode September 2016 mencapai 100,47.

Gap tingkat kemiskinan di perkotaan dan di pedesaan berfluktuasi dan cenderung menyempit



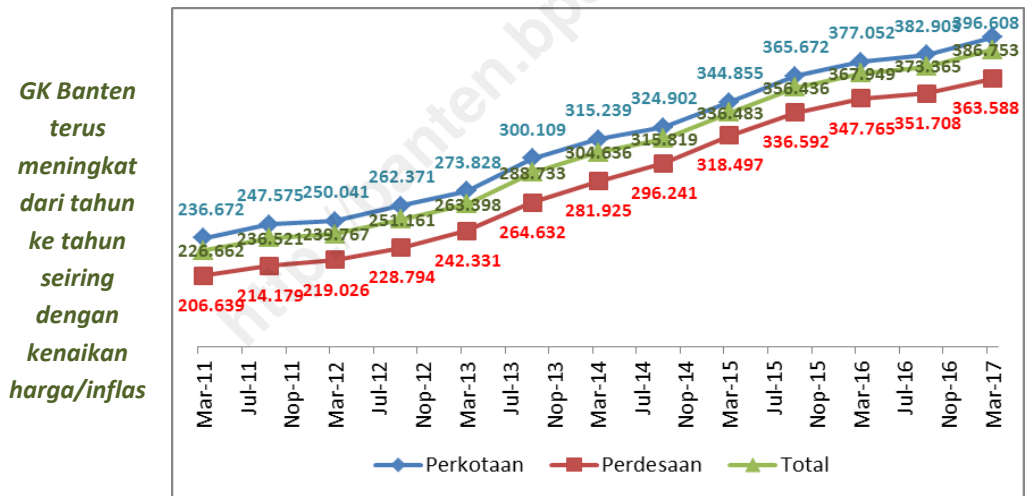
Gambar 3 menunjukkan perkembangan tingkat kemiskinan menurut klasifikasi daerah yaitu perkotaan dan pedesaan. Perbedaan atau *gap* tingkat kemiskinan di perkotaan dan di pedesaan selama periode September 2011-Maret 2017 berfluktuasi dan cenderung melebar. Kemiskinan yang relatif tinggi di pedesaan memerlukan perhatian yang lebih intensif dari pemerintah. Sarana dan prasarana yang memadai khususnya di sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama penduduk di pedesaan perlu diupayakan, sehingga derajat kehidupan petani dapat meningkat. Hal ini diperparah pula dengan nilai tukar petani yang rendah dibawah 100 pada Maret 2017. Sedangkan penduduk miskin di perkotaan walaupun angkanya lebih rendah dibandingkan di pedesaan, tetapi menunjukkan pola meningkat. Pemerintah harus mampu menjaga kemampuan daya beli dari masyarakat yang hampir

miskin khususnya di perkotaan, karena kelompok ini sangat rentan dan mudah jatuh ke bawah garis kemiskinan.

<http://banten.bps.go.id>

BAB IV
GARIS KEMISKINAN (GK)

Seiring dengan peningkatan harga, Garis Kemiskinan (GK) terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada Maret 2011, GK Banten masih sebesar Rp 226.662,- per kapita per bulan. GK ini terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya seiring peningkatan harga kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Angka terakhir pada Maret 2017 GK Banten mencapai Rp. 386.753,- per kapita per bulan. Jadi, misalnya 1 rumah tangga terdiri dari 4 (empat) orang anggota rumah tangga, maka untuk kebutuhan makanan dan non makanan selama sebulan diperlukan minimal sebesar Rp 1.547.012,-.



Gambar 4. Perkembangan Garis Kemiskinan Banten, Maret 2011-Maret 2017

Untuk membandingkan angka kemiskinan antar negara, Bank Dunia menghitung GK dengan menggunakan estimasi konsumsi yang dikonversi ke dalam US\$ PPP (Purchasing Power Parity), bukan nilai tukar US\$ resmi. Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli suatu barang tertentu dimana barang yang sama tersebut dapat dibeli seharga US\$ 1 di Amerika. Ukuran Bank Dunia memilah dua batasan penduduk miskin yaitu dibawah US\$ 1 PPP per kapita per hari dan dibawah US\$ 2 PPP per kapita per hari.

Berdasarkan GK, tingkatan kemiskinan penduduk dapat dipilah menjadi 4 :

- Sangat Miskin (SM) : pendapatan/kapita/bulan \leq 0, 8GK
- Miskin (M) : 0, 8GK $<$ pendapatan/kapita/bulan $<$ =GK
- Hampir Miskin (HM) : GK $<$ pendapatan/kapita/bulan $<$ =1, 2GK
- Rentan Miskin Lainnya (RML) : 1, 2GK $<$ pendapatan/kapita/bulan $<$ =1, 6GK

Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, Garis Kemiskinan di perkotaan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan garis kemiskinan di perdesaan. Perbedaan ini disebabkan biaya hidup di perkotaan yang jauh lebih tinggi. Pada Maret 2017, GK di perkotaan sebesar Rp. 396.608,- per kapita per bulan, naik sebesar 3,58 persen dibandingkan periode September 2016. Sedangkan GK di perdesaan sebesar Rp. 363.588,- per kapita per bulan, naik 3,38 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Tabel 3. Garis Kemiskinan Banten Maret 2017

GK	Kota	Desa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	271.751	274.157	272.552
Non Makanan	124.857	89.431	114.201
Total	396.608	363.588	386.753

Peranan komoditi makanan terhadap GK jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Pada Maret 2017, GKM di Banten sebesar Rp 272.552,- per kapita per bulan. Sedangkan GKNM sebesar Rp 114.201,- per kapita per bulan. Selama periode Maret 2011-Maret 2017, sumbangan GKM terhadap GK selalu berada pada kisaran 70 persen. Pada Maret 2017, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 70,47 persen, menandakan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang utama bagi masyarakat miskin. Sedangkan jika dilihat menurut wilayah, sumbangan GKM terhadap GK di perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan yaitu 75,40 persen dibanding 68,52 persen.

Pada Maret 2017, peranan beras sebagai penyumbang terbesar GK di daerah perkotaan digantikan oleh rokok kretek filter (16,22%). Keempat komoditi makanan lainnya penyumbang Garis Kemiskinan adalah beras (14,95%), daging ayam ras (3,44%), telur ayam ras (3,19%), dan mie instan (3,00%). Sedangkan di daerah perdesaan, lima komoditi makanan penyumbang terbesar terhadap Garis Kemiskinan secara berturut-turut adalah beras (26,32%), rokok kretek filter (14,70%), daging ayam ras (3,03%), telur ayam ras (2,63%) dan terakhir adalah komoditi bubuk kopi & kopi instan (sachet) sebesar 2,55 persen.

Sedangkan untuk komoditi non makanan, biaya untuk perumahan masih merupakan komoditi penyumbang terbesar GK baik di perkotaan (12,09 persen) maupun di perdesaan (10,20 persen). Kemudian di urutan selanjutnya adalah listrik, pendidikan dan bensin yang berpengaruh besar terhadap GK baik di perkotaan maupun di perdesaan. Komoditi non makanan penyumbang GK terbesar kelima berbeda antara di perkotaan dan di perdesaan, di perkotaan adalah biaya angkutan sementara di perdesaan adalah perlengkapan mandi.

Tabel 4. Lima Komoditi yang Berpengaruh Besar terhadap Garis Kemiskinan (GK) Maret 2017

Komoditi	Kota	Komoditi	Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan			
Rokok kretek filter	16,22	Beras	26,32
Beras	14,95	Rokok kretek filter	14,70
Daging ayam ras	3,44	Telur ayam ras	3,03
Telur ayam ras	3,19	Mie instan	2,63
Mie instan	3,00	Kopi bubuk & kopi	2,55
Bukan Makanan			
Perumahan	11,72	Perumahan	9,71
Listrik	3,08	Bensin	1,80
Bensin	2,53	Pendidikan	1,54
Pendidikan	2,49	Listrik	1,31
Angkutan	1,69	Pakaian jadi perempuan dewasa	0,96

BAB V

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)

Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan/*Poverty Gap Index* (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan atau defisit pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman akan melihat rata-rata jarak pengeluaran per kapita penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar defisit.

Indeks Keparahan Kemiskinan/*Poverty Severity Index* (P2) menunjukkan sebaran pengeluaran antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan akan melihat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin.

Tabel 5. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) di Indonesia Menurut Daerah, September 2016-Maret 2017

Bulan/Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
September 2016	0,687	0,932	0,763
Maret 2017	0,704	1,217	0,859
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
September 2016	0,163	0,173	0,166
Maret 2017	0,149	0,284	0,190

Pada periode September 2016-Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) keduanya mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,763 pada September 2016 menjadi 0,859 pada Maret 2017. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,166 menjadi 0,190 pada periode yang sama. Peningkatan nilai kedua indeks mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin lebar.

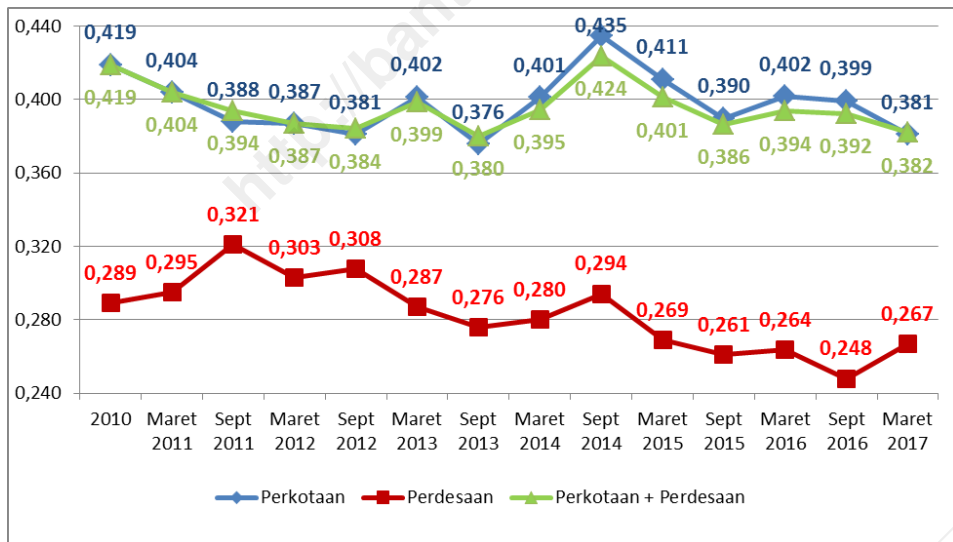
Jika dilihat menurut daerah, di perdesaan baik nilai P_1 maupun P_2 keduanya mengalami peningkatan. Sedangkan di daerah perkotaan hanya nilai P_1 yang naik sedangkan nilai P_2 justru turun. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 selain terjadi peningkatan jumlah, kondisinya juga semakin terpuruk.

<http://banten.bps.go.id>

BAB VI KETIMPANGAN PENDAPATAN

Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan yang sering digunakan adalah *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Pada September 2014 nilai *Gini Ratio* mencapai angka tertinggi sebesar 0,424. Kemudian pada periode selanjutnya nilai *Gini Ratio* menunjukkan kecenderungan menurun hingga mencapai angka 0,382 pada Maret 2017.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di perkotaan pada Maret 2017 tercatat sebesar 0,381. Sementara nilai *Gini Ratio* di perdesaan tercatat sebesar 0,267. Nilai *Gini Ratio* di perdesaan lebih kecil dibandingkan di perkotaan. Hal ini berarti ketimpangan pengeluaran penduduk di perdesaan lebih rendah.



Gambar 5. Perkembangan Gini Ratio Banten, 2010-2017

Selain *Gini Ratio* ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Pada Maret 2017, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,50 persen yang berarti Banten berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan Maret 2017 ini naik 0,09 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2016 (17,41 persen).

Berdasarkan ukuran Bank Dunia tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori:

- Tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen;
- Tingkat ketimpangan sedang jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya berkisar antara 12-17 persen;
- Tingkat ketimpangan rendah jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya berada di atas 17 persen.

Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari *Gini Ratio*, ukuran ketimpangan Bank Dunia pun mencatat hal yang sama yaitu ketimpangan di perkotaan lebih parah dibandingkan dengan ketimpangan di perdesaan. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada Maret 2017 adalah sebesar 17,17 atau lebih mendekati kelompok ketimpangan sedang. Sementara itu, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan pada Maret 2017 adalah sebesar 22,91 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah.

Tabel 6. Distribusi Pengeluaran Banten, September 2016-Maret 2017

Bulan/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Teratas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
September 2016	16,77	36,90	46,33	100
Maret 2017	17,17	37,97	44,86	100
Perdesaan				
September 2016	23,81	41,75	34,44	100
Maret 2017	22,91	41,53	35,56	100
Total				
September 2016	17,41	36,08	46,51	100
Maret 2017	17,50	36,83	45,67	100

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BANTEN**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kav. H1-2, Curug - Kota Serang
email : bps3600@bps.go.id , website : <http://banten.bps.go.id>

ISSN 2443-3411



9 772443 341002